



PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2016

Kelompok Pembahasan: Kesehatan

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan

Jakarta, 16-24 April 2015



Buku I: STRATEGI PEMBANGUNAN

NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN


<p style="text-align: center;">DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan <li style="background-color: yellow;">Kesehatan Perumahan Mental / Karakter 	<p style="text-align: center;">DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri 	<p style="text-align: center;">DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: yellow;">Antarkelompok Pendapatan <li style="background-color: yellow;">Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
---	---	--


KONDISI PERLU


Kepastian dan Penegakan Hukum	Keamanan dan Ketertiban	Politik & Demokrasi	Tata Kelola & RB
-------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

2

 Sasaran Pokok Pembangunan Kesehatan			
NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
1. SASARAN MAKRO			
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
d.	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Okt, 2014)	68
KESEHATAN			
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
a.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	346 (SP 2010)	*)
	- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	70,4 (2013)	77
	- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	70,4 (2013)	74
b.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	32 (2012/2013)	*)
	- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	71,3 (2013)	78
	- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90 (2014)	91,5
c.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	18,3
d.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	30,5
*) Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun			

 Sasaran Pokok (2)			
NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	271
b.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
c.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	24,6
d.	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
e.	Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun	7,2 (2013)	6,4
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	700
b.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	80
c.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	2.000




Sasaran Pembangunan Kesehatan Lainnya

No	Indikator	Target RPJMN 2015-2019	Target 2016
a	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	107,2	99,6
b	Persentase Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran kesehatan lebih dari 10 persen dari APBD	-	55
c	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	18,2	22,7
d	Prevalensi gizi buruk pada balita (persen)	-	5,2%
e	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	300	245
f	Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	5.600	1.600
g	Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	6.000	1.400
h	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	60	35
i	Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis	60	15
j	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84	81
k	Persentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,19	1,27
l	Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi	2,3	2,36
m	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all method</i>) (persen)	66,0	65,4




Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Memperkuat advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBP)
6. Memperkuat akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
7. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga
8. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga
9. Memperkuat kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta memperkuat data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana



Perkuatan

- 1. Penguatan untuk melaksanakan quick win Presiden:**
kerjasama puskesmas dengan UTD, pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda, pendataan kebutuhan kapal RS, peningkatan anggaran kesehatan pemerintah melalui APBN dan APBD, rumah sehat
- 2. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta penyakit menular:**
cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN, sistem pengumpulan data kematian ibu, pengembangan kebijakan gizi masyarakat dengan fokus pada 1000 HPK, penguatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- 3. Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat SJSN Kesehatan:**
perluasan kepesertaan KIS terutama peningkatan PBI, penguatan sistem tarif premi dan pembayaran provider, pengembangan pemantauan dan evaluasi, penguatan ketersediaan sisi suplai yankes



Perkuatan...

- 4. Penguatan sistem kesehatan:**
penguatan sistem movev dan informasi, pengembangan model penempatan nakes berbasis tim dan pemenuhan dokter spesialis, peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di faskes dasar, penyesuaian iuran JKN, integrasi rekam medis online puskesmas dan rumah sakit
- 5. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan:**
sistem rujukan nasional, regional dan provinsi, akreditasi RS, akreditasi Puskesmas, pengembangan fasilitas di DTPK
- 6. Penguatan upaya promotif dan preventif :**
advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan, penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, UKBM, pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu di DTPK, peningkatan efektivitas BOK

 <h2 style="text-align: center;">Hal-hal Yang Diharapkan Dari Daerah</h2>	
PROVINSI	KAB/KOTA
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. • Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. • Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi • Penerbitan izin PBF cabang dan cabang penyalur alat kesehatan, usaha kecil obat tradisional • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. • Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. • Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin apotek, usaha mikro obat tradisional, sertifikat produksi alkes dan PKRT, pengawasan post-market obat dan makanan • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kab/kota.
<p style="font-size: small;">Sumber: UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p>	



TERIMA KASIH